

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan Surat No. 0970029525 tentang Izin Pekerjaan Tenaga Kerja

Surat:

Tanggal

Penerbitan 24 November 2008

Surat:

Inti:

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, mangkir selama 3 hari berturut-turut maksudnya orang asing belum meminta izin kepada pemberi kerja atau manajer kehidupannya, melaporkan terlebih dahulu dan pada hari kerja sebenarnya mangkir selama 3 hari berturut-turut, namun hari libur dan hari istirahat tidak dapat dianggap mangkir dan tidak dihitung dalam jumlah hari mangkir

Isi Lengkap: Mengenai cara penentuan waktu awal dan jumlah hari terhadap orang asing yang terjadi mangkir selama 3 hari berturut-turut, berdasarkan penjelasan surat komite kami No. 0215606 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing tahun 2000 Taiwan pada tanggal 22 Agustus 2000, kira-kira maksudnya berdasarkan peraturan Pasal 52 butir 1 (sekarang Pasal 56) Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut), "mangkir selama 3 hari berturut-turut" maksudnya orang asing belum meminta izin kepada pemberi kerja atau manajer kehidupannya, melaporkan terlebih dahulu dan pada hari kerja sebenarnya mangkir selama 3 hari berturut-turut, namun hari libur dan hari istirahat tidak dapat dianggap mangkir dan tidak dihitung dalam jumlah hari mangkir. Selain itu pemberi kerja "dalam 3 hari" harus memberi tahu otoritas lokal dan lembaga kepolisian, maksudnya setelah orang asing mangkir selama 3 hari berturut-turut pada hari kerja sebenarnya, dalam 3 hari mulai dari hari berikutnya memberi tahu otoritas lokal dan lembaga kepolisian, bila hari terakhir adalah hari Minggu, hari libur nasional atau hari istirahat lainnya, maka hari berikutnya sebagai hari terakhir dari periode tersebut; bila hari terakhir adalah hari Sabtu, maka hari Senin berikutnya sebagai hari terakhir periode tersebut. Dan lagi setelah kedua pihak setuju untuk memutuskan hubungan kerja, orang asing tersebut kehilangan kontak, pemberi kerja tetap harus mengurus pelaporan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut.